

ABSTRAK

Meningkatnya pembangunan perumahan, seringkali tidak diselaraskan dengan pemenuhan kewajiban oleh pelaku usaha. Salah satunya penyampaian informasi yang tidak benar melalui media brosur sehingga konsumen dirugikan. Hal ini tidak sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan metode interpretasi dengan cara induktif. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Karawang. Hipotesa dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan kepada konsumen atas informasi yang tidak benar yang disajikan dalam bentuk promosi iklan perumahan yang diberikan oleh pengembang perumahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan oleh BPSK diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Informasi yang tidak benar, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

The increased house development, often not aligned with the fulfillment of obligations by business actors. One of them is delivering incorrect information through the brochure media so that consumers are disadvantaged. This is not in accordance with consumer protection laws.

This research uses normative juridical method. The research specification is descriptive analytical. Data collection techniques through library research and field research. Data analysis uses the interpretation method by inductive method. The study was conducted in Karawang Regency. The hypothesis in this study is Law No. 8 of 1999 Concerning Consumer Protection provides consumers with protection for incorrect information presented in the form of housing advertisement promotions provided by housing developers.

The results show that consumers are given the right to choose the goods and / or services they want based on the disclosure of true, clear and honest information. Every disadvantaged consumer can sue business actors through institutions tasked with resolving disputes between consumers and business actors or through the courts within the general court environment. Settlement of consumer disputes outside the court by BPSK is held to reach an agreement on the form and amount of compensation and / or regarding certain actions to guarantee that it will not happen again or that the loss suffered by the consumer will not recur

Keywords: Consumer Protection, Incorrect Information, Law Number 8 Year 1999 Concerning Consumer Protection